

# **PENGARUH PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE*, STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH DI KOTA MAGELANG)**

**Febri Putri Kristiani**

UPN "Veteran" Yogyakarta; vebbyputrikristiani@gmail.com

Alp Yuwidianoro

UPN "Veteran" Yogyakarta; yuwidianoro@yahoo.co.id

## **ABSTRACT**

*This research was conducted to determine the factors that affect the quality of local government financial reports . The factors studied were the application of good governance, accounting standards of government, and the application of Financial Accounting System.*

*Collecting data this research used a questionnaire survey. The questionnaire was delivered to 110 employees working units (SKPD ) Magelang city in financial/ accounting division, total of 95 questionnaires ( 86,36 % ) returned complete and can be processed . The data collected were processed using SPSS version 20.0. The statistical methods used to test the hypotheses is multiple linear regression analysis.*

*The results of hypothesis testing is were the application of good governance, accounting standards of government, and the application of Financial Accounting System has a significant positive effect on the quality of local government financial reports.*

**Keywords** : *quality of financial reporting, good governance, accounting standards of government, and Financial Accounting System.*

## **1. PENDAHULUAN**

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) merupakan isu aktual dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Praktik pemerintahan yang baik dapat meningkatkan iklim keterbukaan, partisipasi dan akuntabilitas sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *good governance* pada sektor publik (Diana, 2013).

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dapat dibuktikan dengan sesuainya pengelolaan anggaran oleh pemerintah daerah dengan laporan keuangan pemerintah daerah. Berbagai perundang-undangan dan produk hukum telah ditetapkan dan mengalami perbaikan atau penyempurnaan untuk menciptakan sistem pengelolaan anggaran yang mampu memenuhi

berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat, yaitu terbentuknya semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah. Sehingga bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan keuangan daerah tersebut berupa laporan keuangan pemerintah daerah.

Penerapan otonomi daerah yang baik menghasilkan tata kelolaan yang baik. Otonomi daerah membutuhkan peningkatan kualitas pengelolaan pemerintahan daerah yang baik atau dikenal dengan istilah *Good Governance*. dengan diterapkannya prinsip-prinsip *good governance* diharapkan dapat memperbaiki kinerja pemerintah

daerah dalam menjalankan roda pemerintahan daerah. Salah satu fungsi dari pemerintahan adalah fungsi pelayanan masyarakat. Kinerja pemerintah yang optimal pada akhirnya harus dapat menciptakan kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Kepuasan ini menjadi salah satu landasan kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap legitimasi pemerintahan yang ada.

Hal lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah manfaat penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelola keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah. Namun pada kenyataannya hasil penelitian dari pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dari penelitian Irma (2014) dengan Syifa (2014) tidak konsisten sehingga peneliti akan menguji kembali ketidakkonsistenan hasil tersebut.

### **Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Mardiasmo (2004) menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dalam pelaporan keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik serta baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya.

### **Pemerintah Daerah**

Berdasarkan PP 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Di dalam Undang-Undang yang mengatur keuangan negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan; dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

### **Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Laporan keuangan pemerintah daerah adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Laporan keuangan yang berkualitas baik yaitu berupa laporan keuangan yang mempunyai nilai informasi yang dibutuhkan oleh pengguna dan sudah memenuhi syarat atau standar yang sudah diberlakukan pada setiap daerah. Standar akuntansi pemerintahan yang berlaku yaitu nomor 71 Tahun 2010. Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) yaitu andal, relevan, dapat dipahami dan dapat dibandingkan.

### **Cash Basis**

Basis akuntansi merupakan salah satu konsep yang sangat penting dalam akuntansi, dimana pencatatan basis kas adalah teknik pencatatan ketika transaksi terjadi dimana uang benar-benar diterima atau dikeluarkan.

### **Accrual Basis**

Teknik basis akrual memiliki fitur pencatatan dimana transaksi sudah dapat dicatat karena transaksi tersebut memiliki implikasi uang masuk atau keluar di masa depan. Transaksi dicatat pada saat terjadinya walaupun uang belum benar-benar diterima atau dikeluarkan. Dengan kata lain basis akrual digunakan untuk pengukuran aset, kewajiban dan ekuitas dana.

### Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

“OECD dan *World Bank* mendefinisikan *good governance* dengan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political frameworks* bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan acuan dari penelitian (Diana, 2013) yaitu menggunakan 3 pilar dasar yang saling berkaitan satu dengan lainnya dalam mewujudkan *good governance* (Osborne and Geabler, 1992, *OECD and World Bank*, 2000, LAN dan BPKP, 2000, Bappenas, 2003) adalah sebagai berikut:

1. **Transparansi**, yaitu keterbukaan dalam manajemen pemerintah, lingkungan, ekonomi dan sosial.
2. **Partisipasi**, yaitu penerapan pengambilan keputusan yang demokratis serta pengakuan atas HAM, kebebasan pers dan kebebasan mengemukakan pendapat/ aspirasi masyarakat.
3. **Akuntabilitas**, yaitu kewajiban melaporkan dan menjawab dari yang dititipi amanah untuk mempertanggungjawabkan kesuksesan maupun kegagalan kepada penitip amanah sampai yang memberi amanah puas dan bila belum ada atau tidak puas dapat dikenai sanksi.

### Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan standar yang harus diikuti dalam laporan keuangan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengguna laporan keuangan akan menggunakan SAP untuk memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Hasil dari akuntansi adalah laporan keuangan. Pada dasarnya pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi dan akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah

atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik (Mardiasmo, 2006).

### Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri No. 59 Tahun 2007).

## 2. METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah bagian akuntansi/penatausahaan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Magelang meliputi dinas, badan, dan kantor dengan jumlah 22 SKPD. Pengambilan sampel (*sampling method*) terhadap responden dilakukan secara *purposive sampling*.

*Purposive sampling* digunakan karena informasi yang diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti (Sekaran, 2006). Kriteria responden dalam penelitian ini adalah:

- a. Para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/tata usaha keuangan pada SKPD.
- b. Responden dalam penelitian ini adalah kepala dan staf subbagian akuntansi/penatausahaan keuangan, sehingga tiap SKPD ditetapkan secara *cluster sampling* sebanyak 5 orang menjadi responden.
- c. Responden ditetapkan pada kepala bagian, bendahara dan staf bagian keuangan/akuntansi.

Terdapat dua variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu variabel bebas, dan variabel terikat. Variabel dalam penelitian ini adalah penerapan *good governance*, standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Variabel-variabel tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Variabel bebas (*independent variable*) merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain. Pada penelitian ini variabel bebas adalah penerapan *good governance*, penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah.
2. Variabel terikat (*dependent variable*) merupakan variabel yang dipengaruhi variabel lain. Pada penelitian ini variabel terikat adalah kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah Kota Magelang.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/tata usaha keuangan pada SKPD Kota Magelang. SKPD ini meliputi dinas, badan, dan kantor. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Mei 2014 sampai dengan Juli 2015.

#### Metode Analisis dan Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan alat bantu perangkat lunak pengolah data statistik *Statistical Package for the Social Science (SPSS) 20 for Windows*. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari Uji Kualitas Data, Uji Hipotesis, Analisis Regresi Berganda, Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ), Uji Kelayakan Model (Uji F), Uji Parameter Individual (Uji t).

#### Prosedur Analisis

Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode survei langsung menggunakan media kuesioner 63 pernyataan diajukan kepada responden dan kemudian responden diminta menjawab sesuai pendapat mereka. Untuk

mengukur pendapat responden digunakan skala *Likert* lima poin yaitu mulai point 5 untuk pendapat Sangat Setuju (SS) dan poin 1 untuk Sangat Tidak Setuju (STS).

Kemudian dilakukan analisis statistik deskriptif bertujuan menyajikan informasi tentang nilai minimum, nilai maksimum, *mean*, dan standar deviasi yang akan dianalisa. Uji kualitas data digunakan untuk menentukan apakah data yang diperoleh dapat dikatakan sesuai. Kualitas data yang dihasilkan dari jawaban responden dapat berdampak pada ketepatan uji hipotesis. Uji kualitas data pada penelitian ini meliputi uji reliabilitas dan uji validitas. Uji statistik deskriptif digunakan untuk menyajikan dan menganalisis data disertai perhitungan agar dapat memperjelas keadaan atau karakteristik data. Statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai data melalui rata-rata, standar deviasi, maksimum dan minimum.

Uji model terdiri dari uji koefisien determinasi, uji regresi berganda, dan uji t. Uji regresi digunakan untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini. Adapun persamaan regresi untuk seluruh variabel adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$$

Keterangan:

$\alpha$  : Konstanta

Y : Kualitas Informasi Laporan Keuangan Daerah

$X_1$  : Penerapan *Good Governance*

$X_2$  : Standar Akuntansi Pemerintahan

$X_3$  : Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  : Koefisien regresi

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Berikut ini merupakan statistik deskriptif variabel penelitian yang digunakan:

Tabel 1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
GG_X1	95	3,61	4,56	4,0216	,20068
SAP_X2	95	2,80	5,00	4,0653	,39188
SIAKD_X3	95	2,50	5,00	4,1618	,38887
KIL_Y1	95	2,60	5,00	4,1221	,40349
Valid N (listwise)	95				

Sumber: data primer, diolah

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas dapat diketahui bahwa variabel *good governance* memiliki nilai rata-rata sebesar 4,02 dan berada pada interval 3,61 sampai dengan 4,56. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menjawab setuju untuk pernyataan berkaitan dengan *good governance* dan dapat dikatakan cukup tingginya penerapan *good governance* pada subbagian keuangan atau akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang. Nilai standar deviasi sebesar 0,20068 lebih kecil dari pada nilai rata-rata yang artinya penyebaran data baik atau penyimpangan data rendah.

Variabel standar akuntansi pemerintahan memiliki nilai rata-rata sebesar 4,06 dan berada pada interval 2,80 sampai dengan 5,00. Ini berarti sebagian besar responden cenderung menjawab setuju untuk pernyataan yang diajukan berkaitan dengan standar akuntansi pemerintahan dan menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang cukup tinggi. Nilai standar deviasi sebesar 0,39188 lebih kecil dari pada nilai rata-rata yang artinya penyebaran data baik atau penyimpangan data rendah.

Variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah memiliki nilai rata-rata 4,16 dan berada pada interval 2,50 sampai dengan 5,00. Ini berarti sebagian besar responden cenderung menjawab setuju untuk pernyataan yang diajukan berkaitan dengan pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah dan menunjukkan

bahwa pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang cukup tinggi, nilai standar deviasi sebesar 0,38887 lebih kecil dari pada nilai rata-rata yang artinya penyebaran data baik atau penyimpangan data rendah.

Variabel kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah memiliki nilai rata-rata 4,12 dan berada pada interval 2,60 sampai dengan 5,00. Ini berarti sebagian besar responden cenderung menjawab setuju untuk pernyataan yang diajukan berkaitan dengan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah dan menunjukkan bahwa kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang cukup tinggi, nilai standar deviasi sebesar 0,40349 lebih kecil dari pada nilai rata-rata yang artinya penyebaran data baik atau penyimpangan data rendah.

#### Deskripsi Responden

Data penelitian dikumpulkan dengan mengirimkan sebanyak 110 kuesioner yang diantar langsung ke 22 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang dengan responden sebanyak 110. Pengiriman kuesioner dilakukan pada tanggal 28 Mei 2015. Setelah 4 minggu kuesioner yang kembali hanya diperoleh 96 kuesioner.

Tabel 4.1 di bawah ini menunjukkan rincian pengiriman dan pengembalian kuesioner. Tabel tersebut juga menginformasikan tingkat pengembalian (*response rate*).

**Tabel 2** Rincian Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah	%
Kuesioner yang dikirim	110	100%
Kuesioner yang tidak kembali (110-96)	(14)	12,73
Tingkat pengembalian kuesioner (96/110 x 100%)	96	87,27%
Kuesioner yang tidak lengkap	(1)	0,9%
Kuesioner yang dapat diolah (95/110 x 100%)	95	86,36%

**Sumber:** data primer, diolah.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa tingkat pengembalian kuesioner (*response rate*) 87,27% dihitung dari presentase jumlah kuesioner kembali (96 kuesioner) dibagi total yang dikirim (110 kuesioner) dan kuesioner dapat digunakan (*response use*) sebesar 86,36%, dihitung dari presentase jumlah kuesioner yang dapat digunakan (95 kuesioner) dibagi total yang dikirim (110 kuesioner) dari hasil demografi responden menunjukkan responden yang belakang SMA berjumlah 8,42%, Diploma berjumlah 20%, S1 berjumlah 62,10%, S2 berjumlah 9,48%. Sedangkan berdasarkan lama waktu kerja sebagian besar responden memiliki masa kerja selama >5 tahun berjumlah 82,10% masa kerja 1-2 tahun berjumlah 7,37% dan masa kerja 3-4 tahun berjumlah 10,53%.

**Tabel 3** Ringkasan Hasil Perhitungan Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keputusan
Penerapan <i>Good governance</i>	0,766	Reliabel
Standar Akuntansi Pemerintahan	0,887	Reliabel
Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah	0,929	Reliabel
Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0,782	Reliabel

**Sumber:** data primer, diolah.

Dari hasil uji reliabilitas yang dilakukan dengan program statistik SPSS didapat bahwa hasil koefisien *Cronbach Alpha* untuk empat variabel lebih besar dari 0,70. Variabel penerapan *good governance* menunjukkan nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,766. Variabel standar akuntansi pemerintahan sebesar 0,887.

## Uji Kualitas Data

### Uji Validitas

Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *Pearson Correlation* yang terdapat dalam program SPSS 20.0. Suatu pernyataan dikatakan valid jika tingkat signifikansinya berada di bawah 0,5. Tabel 4 berikut menunjukkan uji validitas dari 4 variabel, yaitu penerapan *good governance*, standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah dengan 95 sampel responden.

Hasil uji validitas dari 35 pernyataan pada *good governance* ada 17 pernyataan yang *invalid* yaitu Q4, Q5, Q7, Q10, Q11, Q12, Q16, Q20, Q24, Q26, Q28, Q29, Q31, Q32, Q33, Q34, dan Q35. Sehingga pernyataan yang diolah dari variabel penerapan *good governance* ada 18 pernyataan. Banyak pertanyaan yang menunjukkan *invalid* disebabkan karena ketidakkonsistenan dan ketidakseriusan responden dalam menjawab pernyataan yang diberikan.

### Uji Reliabilitas

Kuesioner dikatakan reliabel jika nilai dari *Cronbach Alpha* di atas 0,70. Hasil perhitungan reliabilitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut:

Variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah sebesar 0,929, dan variabel kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,782. Maka dapat disimpulkan kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini reliabel.

**Uji Hipotesis**

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan bantuan *software SPSS 20 for windows* dihitung seberapa besar persentase pengaruh penerapan *good governance*, standar akuntansi pemerintah

daerah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Kota Magelang disajikan pada Tabel 8 berikut:

**Tabel 4** Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,896 <sup>a</sup>	,802	,796	,18239

Predictors: (Constant), SIAKD\_X3, GG\_X1, SAP\_X2  
 Dependent Variabel: KIL\_Y1

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* adalah sebesar 0,796 atau 79,6%, nilai tersebut menunjukkan bahwa penerapan *good governance*, standar akuntansi pemerintah daerah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah memberikan pengaruh sebesar 79,6% terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan sisanya sebesar

20,4% merupakan pengaruh dari variabel bebas lainnya.

Untuk mengetahui apakah model layak dan dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen, kemudian dilakukan uji kelayakan model (Uji F). Dengan bantuan *software SPSS 20 for windows* diperoleh hasil Uji F sebagai berikut:

**Tabel 5** Uji F

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	12,276	3	4,092	123,011	,000 <sup>b</sup>
	Residual	3,027	91	,033		
	Total	15,304	94			

a. Dependent Variable: KIL\_Y1

b. Predictors: (Constant), SIAKD\_X3, GG\_X1, SAP\_X2

Berdasarkan hasil analisis regresi Uji F pada Tabel 5 dapat dilihat bahwa hasil nilai F hitung sebesar 123,011 dengan taraf tingkat signifikansi 0,000. Karena probabilitas tingkat signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi layak dan dapat digunakan untuk memprediksi variabel

kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Setelah dilakukan uji kelayakan model, kemudian dilakukan uji parameter individual (uji t). Dengan bantuan *software SPSS 20 for windows*, hasil analisis regresi uji t untuk penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Hasil Analisis Regresi

Model	Coefficients <sup>a</sup>						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-1,363	,386		-3,527	,001		
1 GG_X1	,537	,116	,267	4,638	,000	,656	1,524
SAP_X2	,266	,076	,258	3,511	,001	,401	2,492
SIKAD_X3	,539	,069	,520	7,825	,000	,493	2,030

a. Dependent Variable: KIL\_Y1

Berdasarkan hasil pengolahan data yang terdapat pada Tabel 6 dapat dilihat bahwa dari ketiga variabel independen yang dimasukkan ke dalam model penelitian ketiga variabel *independent* berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari probabilitas tingkat signifikansi untuk variabel penerapan *good governance*, standar akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah kurang dari 0,05 atau kurang dari 5%. Untuk probabilitas tingkat signifikan variabel penerapan *good governance* yaitu sebesar 0,000 yang kurang dari 0,05, probabilitas tingkat signifikansi standar akuntansi pemerintahan yaitu sebesar 0,001 dan probabilitas tingkat signifikan variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah sebesar 0,000 yang kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh penerapan *good governance*, standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dengan persamaan:

$$Y = -1,363 + 0,537X_1 + 0,266X_2 + 0,539X_3$$

Persamaan regresi berganda diatas dapat diartikan bahwa koefisien regresi variabel penerapan *good governance* 0,537 (positif). Hal ini berarti bahwa setiap terjadi kenaikan penerapan *good governance* akan meningkatkan

kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,537 atau sebesar 53,7% tanpa dipengaruhi faktor lainnya. Koefisien regresi standar akuntansi pemerintahan 0,266 (positif), hal ini berarti bahwa setiap terjadi kenaikan penerapan standar akuntansi pemerintahan akan meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 26,6% tanpa dipengaruhi faktor lainnya. Koefisien regresi pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah 0,539, hal ini berarti bahwa setiap terjadi kenaikan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah akan meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 53,9% tanpa dipengaruhi faktor lainnya.

#### 4. SIMPULAN

Dari hasil analisis data dan pengujian hipotesis, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan *good governance* berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

### Keterbatasan

Keterbatasan penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Responden yang mengisi kuesioner kurang tepat sasaran karena peneliti tidak memberikannya secara langsung.
2. Peneliti tidak melakukan pilot test terlebih dahulu untuk instrument penelitian yang digunakan, sehingga dari kuesioner yang disebarakan untuk responden masih terdapat pernyataan yang tidak valid.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan *good governance*, standar akuntansi pemerintahan, dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Magelang, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti menyarankan kepada pemerintah daerah Kota Magelang agar meningkatkan *good governance* dalam rangka mewujudkan kinerja pemda yang optimal sehingga menghasilkan kualitas informasi laporan keuangan yang baik dan meningkatkan kepuasan masyarakat sebagai bentuk perwujudan amanah dari rakyat.
2. Sebaiknya untuk penelitian berikutnya bisa mendampingi pengisian kuesioner oleh responden sehingga responden dapat bertanya jika ada pernyataan yang kurang jelas.
3. Penelitian selanjutnya dilakukan terlebih dahulu pilot test untuk instrumen kuesioner yang digunakan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Batubara, A. H. 2006. Konsep *Good Governance* Dalam Konsep Otonomi Daerah. *Jurnal Analisis Administrasi dan Kebijakan*. Volume 3. Nomer 1.
- Darwanis, A. 2012. Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap kualitas Informasi Keuangan SKPD di Kota Banda Aceh. *Jurnal Akuntansi*. Volume 1. Nomer 1. Agustus 2012.
- Diana. 2013. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, Penyelesaian Temuan Audit terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemertintahan yang Baik. *Simposium Nasional Akuntansi XVI*. Manado. September 2013.
- Faristina, R. 2011. *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Keandaalan Dan Timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Studi Pada BLU di Kota Semarang)*, Semarang.
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 19*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. 2003, *Auditing 1 Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan*, Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN.
- Halim, A. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta. Salemba Empat.
- Handayani. 2012. *Good Governance dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah*. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*. Volume 5. Desember 2012.
- Iskandar. 2008. *Metodologi Penelitian dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif)*. Jakarta. Gaung Persada Press.
- Irma. 2014. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Pariaman). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang.
- Krina, P. 2003. *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi, Sekretariat Good Public Governance*. Jakarta. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Luthfi, A. 2014. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi

- Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Kabupaten Grobogan. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Pembangunan Veteran Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance, *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. Volume 2. Nomer 1. Mei 2006. Hal 1-17.
- Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah. 2005. Standar Akuntansi Pemerintah. PP Nomor 24 Tahun 2005.
- Peraturan Pemerintah. 2006. Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. PP Nomor 8 Tahun 2006.
- Peraturan Pemerintah. 2005. Keuangan Daerah. PP Nomor 58 Tahun 2005.
- Roviyanti, Devi. 2009. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tasikmalaya). Program Sarjana Universitas Siliwangi.
- Rukminto, A. I. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Jakarta. FISIP UI Press.
- Sekaran, U. 2006. *Research Methods For Business, 4<sup>th</sup> Edition: Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta. Salemba Empat.
- Suhardjo. 2013. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal STIE Semarang*. Volume 5. Oktober 2013.
- Sunarto, 2003, Auditing, Panduan, Yogyakarta.
- Syifa. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di SKPD Kota Depok. *Diponegoro Journal of Accounting*. Volume 3.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Yani, A. 2008. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Zeyn, Elvira. 2011. Pengaruh *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan Vol.1 No.1, April 2011. PP 21-37*